

# Buletin Parlementaria

Nomor 1160/IV/VII/2021 • Juli 2021



## DPR Laksanakan Kurban Dengan Taati Prokes



9 772614 339005



BULETIN



**3 Segera Kirim  
Vaksin ke Daerah  
yang Kehabisan  
Stok**



**4 PPKM Darurat  
Bisa Bangkitkan  
Perekonomian**

# DPR Laksanakan Kurban Dengan Taati Prokes



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dengan didampingi pejabat Kesetjengan DPR RI membuka acara pemotongan hewan kurban di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Runi/Man

**S**uasana Iduladha di tengah pandemi Covid-19 tak menyurutkan semangat Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI dalam melaksanakan ibadah kurban. Segala aktivitas penyembelihan hewan dan distribusi daging dilakukan dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penularan Covid-19.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dengan didampingi pejabat Kesetjengan DPR RI membuka acara pemotongan hewan kurban di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen. "Saya kira kita dapat memaknai Iduladha ini dengan

semangat berbagi secara ikhlas kepada saudara kita yang lain. Isu ini masih sangat relevan sampai saat ini," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/7).

Apalagi di masa pandemi seperti ini, menurut Indra, masih banyak masyarakat yang kesulitan dari segi ekonomi. Oleh karena itu daging hewan kurban nantinya akan didistribusikan secara merata ke petugas *cleaning service* di lingkungan Parlemen, *office boy* dan pramubakti, petugas pertamanan dan kebun, para pegawai kantin di dalam Kompleks Parlemen, masyarakat di sekitar Kompleks Parlemen, juga petugas damkar hingga karyawan.

Sekjen Indra juga menegaskan, pemotongan hewan dan distribusi daging tetap menerapkan prosedur protokol kesehatan. Seperti kewajiban pemakaian masker, sarung tangan hingga penerapan *physical distancing* dan prosedur penyesuaian normal baru lainnya dilakukan tim pemotongan hewan kurban. Meski pelaksanaannya minimalis, namun hal tersebut tak mengurangi semangat pelaksanaan kurban kali ini jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kurban Masjid Baiturrahman DPR/MPR/DPD RI Suratna merincikan jumlah hewan

yang dikurban di Kompleks Parlemen berjumlah 13 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Ia memastikan bahwa proses penyembelihan dan distribusi dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. "Kami melibatkan tim pemotongan hewan yang profesional serta syar'i," ujarnya.

Distribusi daging juga tidak mengundang penerima, namun langsung men-*drop* daging ke beberapa zona di Kompleks Parlemen agar pembagian dapat berjalan secara merata dan diterima yang membutuhkan. Panitia kurban berharap kurban kali ini dapat menjadi amal ibadah yang berguna dan berbalas pahala berlipat ganda. ■ ah/sf

# Segera Kirim Vaksin ke Daerah yang Kehabisan Stok



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Kresno/Man

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan vaksin Covid-19 di sejumlah daerah. Vaksinasi tidak boleh terhenti untuk mengejar target *herd immunity* atau kekebalan kelompok yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Antusiasme rakyat untuk divaksin

di sejumlah daerah jangan sampai menurun karena vaksin tidak tersedia,” kata Puan di Jakarta, Rabu (21/7). Puan melanjutkan, Presiden Jokowi telah memerintahkan penda cepat menghabiskan stok vaksin, selain itu harus diimbangi oleh pengadaan vaksin yang juga cepat juga oleh pemerintah pusat.

“Jangan sampai ada jeda. Vaksinasi jangan sampai terhenti karena vaksin tidak tersedia,” ujarnya. Puan meminta pemerintah terus berupaya dengan segala cara untuk mendatangkan vaksin, sehingga tidak ada lagi laporan dari daerah bahwa vaksin habis sehingga vaksinasi terhenti.

“Pemda sudah menjalankan perintah Presiden agar vaksin dihabiskan dan tidak ada lagi stok. Tinggal sekarang pemerintah yang harus gerak cepat untuk mendatangkan vaksin. Jadi pemerintah pusat yang mendatangkan vaksin harus kejar-kejaran dengan pemerintah daerah yang melaksanakan vaksinasi,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Seperti diketahui, laporan stok vaksin menipis atau bahkan habis disampaikan sejumlah kepala daerah di beberapa provinsi, antara lain Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, NTB hingga NTT. Beberapa daerah sudah menghentikan vaksinasi karena stok vaksin habis dan belum dikirim lagi oleh pemerintah pusat. ■ tn/sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Andi Nurul Naupal Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindyia, S.Sos, Ertangga Panji Sarnudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

**FOTOGRAFER**  
Prima Danutirto, A.Md, Naefurroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldio Opie, Hasri Mentari

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhammad Hendar Assifa, S.Kom

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO**  
**DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# PPKM Darurat Bisa Bangkitkan Perekonomian

**W**akil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut menanggapi keputusan pemerintah yang memperpanjang

Wakil Ketua DPR RI  
Rachmat Gobel.  
Foto: Jaka/Man

kebijakan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021, yang kemudian direncanakan akan dilonggarkan pada 26 Juli 2021 jika tren kasus Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air mulai menurun.

“Kepercayaan pasar yang sampai saat ini masih cukup tinggi, pada gilirannya akan membangkitkan perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) tersebut dalam keterangan tertulisnya yang diterima *Parlementaria*, di Jakarta, Rabu (21/7).

Lebih lanjut Gobel menyatakan, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan PPKM Darurat bisa dilihat dari perspektif negatif dan positif. Dari perspektif negatif, penerapan PPKM Darurat bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Namun dari perspektif positif dan optimistik, PPKM Darurat bisa menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap berbagai kebijakan dan upaya pemerintah menurunkan kasus Covid-19.

Legislator dari Gorontalo tersebut juga menilai penerapan PPKM Darurat menunjukkan pemerintah sangat serius menangani pandemi Covid-19. Kebijakan itu bukanlah *lockdown*, melainkan hanya pembatasan kegiatan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan, antara penyelesaian masalah kesehatan dan perekonomian.

Pilihan diksi darurat, menurut politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menunjukkan adanya kesungguhan, ketegasan serta kesegeraan. Serta yang

terpenting adalah semua langkah pemerintah dilakukan secara terukur, konsisten dan transparan agar ekonomi bisa segera bangkit kembali.

“Kita lihat rumah-rumah sakit sudah penuh, obatan-obatan dan oksigen sempat diperebutkan. Bayangkan jika tak ada PPKM Darurat, maka orang yang terpapar virus Corona diprediksi makin membludak. Jangan sampai infrastruktur kita kolaps,” sambung Gobel.

Menurutnya, penerapan PPKM Darurat adalah bagian dari upaya mengerem laju penyebaran virus Corona. Kebijakan yang pasti berdampak pada sisi ekonomi itu akan dirasakan berat oleh para pelaku UMKM, masyarakat miskin dan masyarakat rentan. “Regulasi PPKM Darurat memang sudah rinci dan baik, tapi ventilator pengamanan tetap dibutuhkan, khususnya terhadap para pedagang kaki lima,” papar Gobel.

Dalam hal itu, pemerintah perlu memperkuat Permodalan Nasional Madani (PNM) yang selama ini bergerak di sektor ekonomi mikro dengan melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM agar lebih aktif menjemput bola. “Jika kita menjaga agar yang besar jangan runtuh, maka yang mikro tidak boleh roboh. Mereka ini *local investor*. Jadi perlu pendekatan korporasi terhadap mereka. Karena mereka sebenarnya korporasi juga,” ujarnya.

Gobel mengingatkan pemerintah agar menyediakan bantuan-bantuan sosial untuk para pelaku UMKM. Pada saat bersamaan, pemerintah harus menyisir lapangan dengan baik, sehingga sektor informal yang menyerap begitu banyak tenaga kerja tidak tumbang. Intinya, pemerintah harus juga menimbang batas-batas kemanusiaan. “Kuncinya adalah konsistensi, transparansi, dan kemanusiaan,” pungkas Gobel. ■ *bia/sf*

# Gus Muhaimin: Indonesia Berduka, Lebih dari 1.000 Nakes Gugur Karena Covid-19

**W**akil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan Indonesia Berduka atas gugurnya 1.000 orang lebih tenaga kesehatan (nakes) karena Covid-19. Ia mengaku sangat prihatin dan menyampaikan duka mendalam, sebab dokter maupun perawat merupakan ujung tombak yang berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Nakes adalah kita. Ketika nakes sakit maka kita pun sakit. Ketika nakes tidak selamat, Indonesia tidak selamat. Perang melawan Corona hari-hari ini harus kita menangkan. Indonesia harus menang. Indonesia tidak boleh kalah," ujar Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, Senin (19/7).

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih menyebabkan sedikitnya 73.582 korban jiwa. Dari jumlah itu, ternyata tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat yang meninggal dunia akibat Covid-19 cukup tinggi, mencapai hampir 1.000 orang.

Mengacu pada data Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), per 18 Juli 2021, ada sebanyak 545 dokter di Indonesia meninggal dunia akibat Covid-19. Sementara data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), sekitar 7.392 perawat yang terkonfirmasi positif Covid-19, suspek sebanyak 309 perawat, dan mereka yang gugur sebanyak 445 perawat. Jika dihitung secara total seluruh nakes yang meninggal dunia mengacu pada data Pusat Digital Laporan Covid-19 per 18 Juli 2021 mencapai 1.439 orang.

Pimpinan DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini

menambahkan, agar kasus kematian nakes tidak terus bertambah, Gus Muhaimin mendesak pemerintah memberikan perhatian serius dan upaya maksimal dengan mencari cara agar mereka bisa terhindar dari Covid-19.

"Bunga-bunga bangsa telah gugur untuk kebaikan kita, untuk keselamatan Indonesia. Saya mendesak dan mendukung agar pemerintah segera memberikan dosis vaksin kedua/ketiga kepada nakes kita dan warga kita," pesan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Di sisi lain, Gus Muhaimin juga minta agar pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para nakes. Salah satunya adalah dengan segera mencairkan bonus (insentif) bagi para Nakes. DPR, kata Gus Muhaimin, juga akan mendukung sepenuhnya dari sisi anggaran untuk memberikan perhatian lebih baik sebagai penghargaan maupun jaminan keamanan dan keselamatan bagi para nakes yang sedang berjuang di garda terdepan penanganan pandemi.

"Mereka berjuang dengan bertaruh nyawa, bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19, sudah sepatutnya negara memberikan apresiasi setinggi-



Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Foto: Nadi/Man

tingginya bagi para nakes," katanya.

Hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah semakin banyak korban jiwa bagi nakes adalah bagaimana masyarakat lebih disiplin dalam menaati protokol kesehatan. Dengan begitu, diharapkan jumlah kasus Covid-19 akan berkurang, sehingga beban para nakes di rumah sakit tidak semakin berat.

"Ayo sama-sama kita berjuang melawan pandemi ini. Ini adalah perang sesungguhnya, meski cara kita dalam berperang melawan Covid-19 berbeda dengan perang pada umumnya dengan mengangkat senjata. Perang kita kali ini adalah melindungi diri masing-masing sebaik mungkin agar terhindar dari virus ini. Mari kita dukung seluruh program pemerintah dalam menangani pandemi ini. Jangan saling menyalahkan karena ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Indonesia harus bersatu," tutup Gus Muhaimin. ■ rdn/es

# DPR Perkenalkan Tata Kelola Baru Penggunaan Dana Otsus dalam UU

**K**etua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun memperkenalkan tata kelola baru penggunaan dana Otsus yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Otsus Papua yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna pada Kamis (15/7). Menurutnya, permasalahan mengenai dana Otsus di Papua maupun Papua Barat ini lebih dari sekedar jumlah dana yang disalurkan.

“Sekalipun Pansus DPR dan pemerintah bersepakat bahwa Dana Otsus mengalami peningkatan dari 2 persen DAU Nasional menjadi 2,25 persen, namun, RUU ini telah memperkenalkan sebuah tata kelola baru bagi penggunaan Dana Otsus,” jelas Komarudin dalam Laporan Pansus RUU tentang Otsus bagi Provinsi Papua di hadapan Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7).

Komarudin melanjutkan, tata kelola tersebut memiliki dua skema, yakni penerimaan umum dan penerimaan yang berbasis kinerja pelaksanaan. Penerimaan berbasis kinerja pelaksanaan ini mengatur bahwa sebesar minimal 30 persen dialokasikan untuk pendidikan, dan 20 persen untuk kesehatan. Menurut Anggota Komisi II DPR RI tersebut, aturan ini merupakan sebuah skema baru yang diharapkan mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Papua, yang pada akhirnya akan menyejahterakan Orang Asli Papua (OAP).

“RUU ini juga mengatur indikator dalam pembagian penerimaan dana Otsus termasuk memperhatikan jumlah



Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI Komarudin Watubun. Foto: Runi/Man

OAP, tingkat kesulitan geografis, dan indeks kemahalan konstruksi. Hal ini dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Papua saat ini,” imbuh politisi PDI-Perjuangan ini.

Kemudian, lanjut Komarudin, untuk mekanisme pembagian dana Otsus

dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPD juga akan dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana Otsus. Penggunaan dana Otsus ini pun, lanjut Komarudin, nantinya juga memiliki rencana induk yang ditetapkan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.

Perubahan Undang-Undang ini diharapkan dapat memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus. Sehingga dapat lebih tepat sasaran, sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di Papua khususnya OAP. Melalui perubahan tata kelola dana Otsus, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat diatasi,” ujar legislator dapil Papua itu. ■ hal/sf



**TATA KELOLA  
TERSEBUT MEMILIKI  
DUA SKEMA, YAKNI  
PENERIMAAN  
UMUM DAN  
PENERIMAAN YANG  
BERBASIS KINERJA  
PELAKSANAAN**

# DPR Setujui Sembilan Nama Ketua dan Anggota BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025



Foto bersama Pimpinan DPR RI dan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI. Foto: RU/ni/Man

**R**apat Paripurna DPR RI menyetujui laporan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 yang telah dilakukan Komisi VII DPR RI.

“Apakah Rapat Paripurna DPR RI yang terhormat menyetujui laporan Komisi VII atas hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas?” tanya Wakil Ketua DPR RI Korekku Sufmi Dasco Achmad yang memimpin Rapat Paripurna secara virtual dan fisik serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7).

Jawaban “setuju” pun disampaikan seluruh Anggota DPR RI, baik yang hadir secara langsung di ruang Rapat Paripurna DPR RI, maupun yang mengikuti secara virtual dari kediaman masing-masing. Disusul dengan ketukan

palu oleh pimpinan rapat, menjadi tanda disetujuinya sembilan nama Ketua dan Anggota BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 oleh DPR RI.

Sebelumnya, dilaporkan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, bahwa komisi yang dipimpinnya tersebut telah melakukan serangkaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas 18 nama yang masuk menjadi calon Ketua dan Anggota BPH Migas. Satu nama tidak sempat mengikuti tes karena meninggal dunia.

Adapun mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) calon Ketua dan Anggota Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 yang dilakukan Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaannya dibagi atas dua tahap.

Pertama, pemaparan visi, misi dan program, yang disampaikan oleh seluruh calon, yang dilanjutkan dengan tanya-jawab oleh Anggota Komisi VII DPR RI

dan seluruh calon. Kedua, Rapat Intern Komisi VII DPR RI Berdasarkan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), yang dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Mufakat.

“Dari sana disepakati sembilan orang Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2021-2025, yakni Erika Retnowati sebagai Ketua BPH Migas masa jabatan 2021-2025,” ujar politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut.

Sementara delapan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 sebagai berikut Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra. Sugeng berharap Presiden dapat segera menetapkan kesembilan nama-nama Ketua dan Anggota BPH Migas yang telah disetujui oleh DPR RI tersebut, agar semuanya dapat langsung bekerja dan menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. ■ ayu/sf

# Alih Fungsi Fasilitas Kemenhan Jadi RS Covid-19 Diapresiasi

**A**nggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyambut baik langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengalihfungsikan sejumlah fasilitas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi rumah sakit darurat Covid-19. Menurutnya, utilitas fasilitas dan tenaga kesehatan TNI akan memberikan kontribusi besar untuk penanganan pandemi Covid-19.

Fasilitas Kemhan yang dialihfungsikan itu diantaranya Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Kemhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Gedung tersebut diketahui memiliki daya tampung 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur.

Selain itu, Kemhan juga tengah menyiapkan Badiklat Kemhan Salemba Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mes *stand by force* di IPSC Sentul Bogor sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19. Sehingga, jumlah tempat tidur yang disiapkan Kemhan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid 19 mencapai 1.650 tempat tidur untuk wilayah Jabodetabek.

Farhan mengatakan kontribusi Kemhan termasuk kementerian dan lembaga lain diperlukan untuk mengatasi pandemi. Hal yang sama hendaknya juga harus datang dari masyarakat yakni patuh pada aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan penuh kesadaran.

“Kita prihatin. Sebab jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat, padahal PPKM darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli,” kata Farhan dalam keterangan tertulisnya

kepada *Parlementaria*, Jumat (16/7).

Politisi Partai NasDem ini mengingatkan bahwa PPKM Darurat belum berakhir. Ia menyarankan pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisis dengan data akurat. Sebab, lanjut dia, kluster keluarga kini menjadi penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia.

“Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM darurat, sumber melonjak kasus positif ada di mana? Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus Covid-19 di daerahnya masih terus meningkat,” ujarnya.

Legislator dapil Jawa Barat I itu menambahkan, khusus wilayah Jabodetabek, jika perlu dibentuk tim khusus untuk menangani penyebaran Covid-19. Apabila kluster keluarga menjadi persoalan tersendiri peningkatan Covid-19, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai.

“Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan persoalan semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat,”

ujarnya. Di sisi lain, Farhan juga meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung.

Dalam situasi krisis ini, kata dia, semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. “Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat. Kita berharap situasi krisis ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula,” tutup Farhan. ■ *ann/sf*



Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan. Foto: Jaka/Man





# Perpanjangan PPKM Harus Dibarengi Pengawasan Ketat Pemerintah



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto : Andri/Man

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Tak lupa pula, perlu adanya ketegasan pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggarnya.

"Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek

kesehatan maupun ekonomi," kata Luqman dalam keterangan tertulisnya yang diterima *Parlementaria*, Jumat (16/7). Ia menilai apabila pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan maka sebaiknya PPKM Darurat di Jawa-Bali tidak perlu diperpanjang.

Jika demikian, ia menilai, sebaiknya pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19. Untuk itu Luqman meminta pemerintah harus mengevaluasi secara jujur dan obyektif atas pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-

Bali yang telah berlangsung mulai 3 Juli, dan berakhir 20 Juli itu.

"Dari pengamatan lapangan yang saya lakukan 7-11 Juli dan 13 Juli, pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, hari lainnya (Senin-Sabtu) terlihat lalu lintas bebas dimana-mana," urai politisi daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu.

Selain itu menurutnya, beberapa tempat perbelanjaan tetap buka seperti hari-hari biasa, meskipun bukan penyedia bahan makanan dan peralatan kesehatan. Luqman juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan, sehingga seolah-olah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat.

"Saya melihat semua itu, tanggal 13 Juli di beberapa tempat yang masuk wilayah administrasi Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Sebelumnya, pada tanggal 7-11 Juli, saya memantau beberapa daerah di Jawa Tengah, juga melihat hal serupa," kata Luqman.

Lebih lanjut politisi F-PKB tersebut mengatakan, penurunan mobilitas warga dalam kebijakan PPKM Darurat memang terjadi, namun tidak sebanding dengan laju penularan Covid-19. Masih menurut Luqman, maka harus diakui pelaksanaan PPKM Darurat banyak kelemahan di lapangan dan tentu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut.

Ia menilai yang utama adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun; kedua, banyak pemerintah daerah yang kurang tegas dalam pelaksanaan dan pengawasan PPKM Darurat. "Juga banyak daerah yang tidak memberi penjelasan *clear* mengenai bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi selama PPKM Darurat berlangsung," kata Luqman menutup pernyataannya. ■ ah/sf

# Eva Yuliana Dukung Polri yang Telah Menindak Penyebar Informasi Meresahkan

**D**i masa krisis dan sulit akibat pandemi Covid-19, negara dihadapkan dengan berbagai masalah, mulai dari kesehatan masyarakat, perekonomian sulit dan bermacam masalah lainnya. Tidak mudah mengatasi berbagai masalah tersebut, belum lagi disinformasi peredaran berita yang membuat masyarakat bingung dan resah. Menanggapi penyebaran informasi yang meresahkan ini Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mendukung dan mendorong Kepolisian untuk menertibkan informasi di media sosial.

“Saya mendukung langkah Kapolri dalam melaksanakan penertiban di

media sosial, dengan pembentukan patroli siber. Saya pikir ini bukan pembatasan hak menyampaikan pendapat, hanya saja, penyampaian pendapat harus disertai dengan kebenaran, bukan informasi menyesatkan, fitnah, ujaran kebencian, apalagi dengan hoaks,” papar Eva Yuliana dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, baru-baru ini.

Dia pun mencontohkan kasus yang baru-baru ini menyita perhatian publik, yakni diamankannya seorang dokter yang membuat opini tentang Covid-19, dr Lois Owien. Eva berpendapat, kasus ini perlu ditangani secara serius. Sebab opini yang disampaikan dokter tersebut di media massa menyesatkan publik dengan cenderung kontra produktif dengan percepatan penanganan pandemi Covid-19 yang tengah dilaksanakan.

“Dokter Lois sampai ditangkap, ini bagus. Artinya informasinya yang cukup meresahkan masyarakat, dipantau terus oleh badan siber. Saya sendiri mengapresiasi tindakan dari Kepolisian dengan menangkap yang bersangkutan dalam hal ini adalah Lois owien,”

ungkap politisi dari Fraksi Partai NasDem ini.

Menurut Eva, hal ini menunjukkan Polri serius menindak pelaku hoaks dan disinformasi yang

meresahkan publik. Sebab yang bersangkutan diharapkan penyidik sudah mengakui bahwa apa yang menjadi statmen darinya tidak didasari pada riset medis. “Tentu jika (hoaks) ini dipercaya masyarakat akan mencelakakan (keadaan),” ujarnya.

Eva menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, tindakan kejahatan siber cukup meresahkan masyarakat. Terutama marak beredar informasi palsu dan menyesatkan. Kejahatan ini menjadi sangat berbahaya, karena menyesatkan masyarakat, dan ini merupakan tanggung jawab besar Bareskrim Polri.

“Karenanya saya juga mengapresiasi tindakan Polri selanjutnya, yakni melalui Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang juga Ketua Satgas PRESISI Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, dengan melakukan tindakan yang mengedepankan keadilan restoratif atau *restorative justice* dalam penyelesaian kasus ini. Ini menunjukkan kemajuan bagi institusi Polri menuju arah yang humanis dan presisi,” jelas Eva.

Dirinya berharap hal ini bisa menjadi edukasi bagi masyarakat, untuk bisa bijak dalam mengemukakan opini. Terlebih jika opini tersebut berpotensi untuk meresahkan masyarakat yang tengah berjuang untuk lepas dari pandemi Covid-19. Dia mendukung tindakan Patroli Siber Polri yang seiring sejalan dengan tugas pemerintah dalam membasmi Covid-19, dengan menetralkan hoaks tentang Covid-19 dan vaksinasi. “Mari menggunakan media sosial dengan baik dan bijak, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali,” pungkas legislator dapil Jateng V itu. ■eko/sf



Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana. Foto: Jaka/Man



Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto: Arief/Man

**B**erdasarkan laporan temuan BPK semester II tahun 2020 terhadap PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya yaitu PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Indonesia Logistik, ditemukan beberapa penyimpangan yang merugikan negara.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan, di tengah penghargaan atas keberhasilan PT Pupuk Indonesia membukukan keuntungan, namun tetap harus memperhatikan temuan BPK tersebut. “Jangan sampai ada kesan subsidi pupuk untuk petani justru banyak dinikmati oleh BUMN Pupuk,” tukas Slamet dalam rilisnya, yang di terima *Parlementaria* Selasa (20/7).

Slamet menjelaskan, ada banyak temuan BPK terkait Harga Pokok

# PT Pupuk Indonesia Harus Tindaklanjuti Temuan BPK

Produksi (HPP) yang terlalu tinggi karena memasukan biaya-biaya yang seharusnya bukan komponen biaya produksi sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/Sr.130/1/2012 Tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Temuan lain dalam laporan BPK tersebut adalah terkait manajemen hubungan kerja dengan para rekanan yang menyebabkan pemborosan pada biaya distribusi yang ujungnya juga dibebankan pada Harga Pokok

Produksi yang menyedot subsidi pupuk negara pada pembiayaan yang tidak semestinya,” ungkapnya.

Di samping itu, sambung Slamet, ditemukan juga penyaluran pupuk bersubsidi yang belum direncanakan, dilaksanakan dan dipantau secara cermat sehingga tidak tepat sasaran mulai dari distributor sampai ke

pengecer. Hal ini berpotensi ada petani yang tidak mendapatkan haknya sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) atau menyebabkan kelangkaan pupuk di lapangan.

“Persoalan besar pupuk bersubsidi terletak pada besarnya angka subsidi pupuk oleh negara dan manajemen penyaluran yang tidak tepat sasaran menyebabkan pupuk bersubsidi langka, sehingga tetap tidak bisa dirasakan oleh banyak petani dan tidak bisa mendongkrak produktivitas petani. Alhasil angka pertumbuhan produksi panen padi petani menjadi stagnan bahkan cenderung menurun,” papar legislator Fraksi PKS itu.

Dikatakannya, angka subsidi yang sebesar Rp34,2 triliun hanya mensubsidi sekitar 34 persen dari kebutuhan RDKK, atau sekitar 8,8 juta ton dari 26,2 juta ton.

Ia mengatakan, di sisi lain kita sebenarnya banyak melihat kemampuan petani, UKM dan perusahaan swasta menciptakan pupuk murah yang bagus dan diminati petani. Tetapi pemerintah melakukan pembatasan dan mekanisme izin yang super ketat sehingga sulit ditembus, lebih ketat dari masuknya pupuk impor.

“Di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya subsidi pupuk, saya menyarankan agar presiden membuka pembatasan peran serta masyarakat untuk ikut membangun negara melalui penemuan pupuk bagus dan murah dan menekan pemborosan. BUMN harus efisien dan tidak kalah bersaing dengan pupuk buatan petani, UKM atau swasta lainnya,” pungkas legislator dapil Jabar IV itu. ■ dep/es

”

**TERKAIT MANAJEMEN HUBUNGAN KERJA DENGAN PARA REKANAN YANG MENYEBABKAN PEMBOROSAN PADA BIAYA DISTRIBUSI YANG UJUNGNYA JUGA DIBEBANKAN PADA HARGA POKOK PRODUKSI YANG MENYEDOT SUBSIDI PUPUK NEGARA**

# DPR Sambut Baik Langkah Presiden Bagikan Paket Obat Gratis

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi dan menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang memberi paket vitamin dan obat gratis untuk pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Ini adalah langkah yang sudah ditunggu-tunggu. Kami di Komisi VI DPR RI saat rapat dengan BUMN farmasi 7 Juli yang lalu sudah menyuarakan agar ada paket obat dan vitamin gratis yang dibagikan di zona-zona merah. Dengan kebijakan Presiden ini, maka sudah jelas perintahnya dan harus dijalankan dengan mekanisme yang baik dan transparan,” kata Martin dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (15/7).

Pada tahap pertama sejumlah 300.000 paket obat akan dibagikan di Pulau Jawa dan Bali kepada para pasien dengan berbagai jenis gejala. Terkait dengan jumlah tersebut, Martin mengatakan bahwa produksi obat-obatan dan vitamin saat ini di BUMN farmasi sudah cukup masif.

“Rata-rata obat dan vitamin diproduksi pada kisaran 7-9 juta tablet untuk tiap jenisnya. Karena itu, saya mendorong agar paket obat dan vitamin gratis yang diinstruksikan presiden bisa ditingkatkan karena kebutuhan penderita Covid-19 dengan berbagai jenis kisarannya 4-5 juta tablet. Jadi, stok masih sangat cukup,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Martin mengatakan pembagian paket obat dan vitamin gratis secara masif akan menjadi intervensi pasar

yang membuat spekulasi tidak bisa bermain. “Apabila pembagian jutaan paket obat dan vitamin secara gratis berlangsung cepat, maka otomatis akan memengaruhi harga pasar. Harga yang melambung tinggi itu akan segera turun, sehingga ke depan harga obat-obatan dan vitamin akan kembali normal. Ini bentuk intervensi pasar yang harus segera dilakukan,” tutup legislator dapil Sumatera Utara II ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan 300 ribu paket obat dan vitamin untuk masyarakat yang terpapar Covid-19 dan harus melakukan isolasi mandiri (isoman). Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara “Peluncuran Paket Obat Isoman Gratis untuk Rakyat” yang juga dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pejabat terkait lainnya.

“Untuk tahap sekarang ini yang akan dibagikan adalah 300 ribu paket untuk yang melakukan isolasi mandiri di Pulau Jawa dan Bali kemudian akan dilanjutkan dengan 300 ribu paket lagi untuk yang di luar Jawa,” kata Presiden. Sebanyak 300 ribu paket yang dibagikan tersebut, terdapat tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan dibagikan untuk 7 hari.

Paket 1 ini berisi vitamin-vitamin untuk warga dengan PCR (polymerase chain reaction) positif tanpa gejala atau OTG. Paket kedua maupun ketiga tersebut membutuhkan konsultasi dan resep dokter untuk dapat memperolehnya. Paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Kemudian paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. ■ hal/sf

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.  
Foto: Oji/Man



# Masyarakat Harus Kompak Hadapi Perpanjangan PPKM Darurat

**P**emerintah pada Selasa (20/7) telah mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Sonny T. Danaparamitha, Covid-19 adalah badai yang tidak mengenal unsur apapun, sehingga masyarakat harus kompak menghadapi hal itu, terlebih dalam PPKM Darurat.

“Sebagaimana yang saya katakan, bahwa Covid 19 tidak mengenal SARA. Untuk menghadapinya kita perlu kerja sama. Badai yang kita hadapi tidak berbeda. Kita harus kompak dalam satu kapal yang sama,” terangnya dalam keterangan pers yang disampaikan kepada

**Parlementaria,**  
Selasa (20/7).  
Politisi  
Fraksi PDI-  
Perjuangan  
ini

menerangkan, meskipun kebijakan ini akan berdampak dan menambah beban masyarakat menjadi lebih berat, namun demi terputusnya mata rantai penyebaran Covid-19 hal ini harus didukung semua pihak. Ia berharap kebijakan pahit ini dapat menjadi obat mujarab untuk memusnahkan Covid-19.

“Pemerintah telah mengatakan bahwa meskipun kebijakan ini sangat berat, namun harus dilakukan demi mengurangi penularan dan menurunkan jumlah pasien yang harus ke rumah sakit. Tentang hal ini, semua sudah menyaksikan bagaimana situasi rumah sakit di seluruh Indonesia yang

sudah kelebihan kapasitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” imbuhnya.

Terkait dengan berjalannya roda perekonomian dan kebutuhan hidup sehari-hari bagi masyarakat, Sonny menjelaskan,

Anggota Komisi VI DPR RI  
Sonny T. Danaparamitha.  
Foto: Azka/Man

”

**MESKIPUN KEBIJAKAN INI SANGAT BERAT, NAMUN HARUS DILAKUKAN DEMI MENGURANGI PENULARAN DAN MENURUNKAN JUMLAH PASIEN YANG HARUS KE RUMAH SAKIT**

dalam masa perpanjangan ini pasar tradisional dan para pelaku UMKM masih boleh berjualan. Namun demikian, waktu dan pengunjungannya dibatasi serta dilaksanakannya dengan prokes yang ketat. Ia menyatakan, nantinya secara teknis pemerintah daerah yang akan mengaturnya.

“Bagi masyarakat yang menjalani isolasi, pemerintah telah menyiapkan 2 juta paket obat. Sedangkan untuk masyarakat terdampak, pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun,” lanjutnya.

Terakhir, Sonny mengatakan, momen Idul Adha tahun ini harus mengingatkan seluruh masyarakat atas ketauladanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. “Budaya agar selalu siap peduli dan berbagi dengan para tetangga sedang diuji. Adab yang mengatakan bahwa ada sekian kepemilikan yang harus juga diikhhlaskan buat sesama juga harus dijadikan sebuah peristiwa yang nyata,” tukas legislator daerah pemilihan Jawa Timur III itu. ■ er/es



# Pemerintah Harus Optimalkan Kapasitas Pabrik Gas Oksigen yang Mengganggu

**A**nggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, sebaiknya sebelum memutuskan impor gas oksigen dari luar negeri, pemerintah harus memaksimalkan kapasitas produksi pabrik-pabrik gas oksigen yang mengganggu.

“Upaya tersebut bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi pergerakan ekonomi nasional,” ujar Mulyanto dalam siaran persnya yang di terima *Parlementaria*, Rabu (7/7) menyusul rencana pemerintah melakukan impor gas oksigen dari Singapura dan Taiwan.

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, pemerintah perlu mengurai masalah ini secara seksama. Selanjutnya mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Dengan kata lain, pemerintah jangan ikut panik dengan langsung mengimpor gas oksigen.

“Daripada impor, lebih baik optimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang selama ini mengganggu (idle capacity) menuju 100 persen. Kalkulasinya harus matang. Sebab selama ini kinerja perdagangan gas oksigen kita makin membaik, impor terus menurun menuju kemandirian,” jelasnya.

Mulyanto menyebutkan, data BPS menunjukkan impor gas menurun tajam sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Dari impor sebesar 3,9 juta ton di tahun 2017 melorot menjadi hanya sebesar 1,3 juta ton di tahun 2020.

Dibandingkan dengan produksi gas oksigen dalam negeri yang sebesar 640 juta ton per tahun maka impor gas oksigen kita hanya 0,2 persen. Artinya sebesar 99,8 persen kebutuhan gas oksigen dipenuhi dari pengadaan

domestik. Ini pun masih dengan kapasitas produksi sebesar 74 persen. Masih ada kapasitas yang mengganggu sebesar 26 persen atau sekitar 225 juta ton per tahun.

“Ini prestasi yang membanggakan. Bahkan beberapa waktu lalu kita berhasil membantu gas oksigen ini ke India,” lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Banten III itu.

Sementara, dalam paparan Kemenkes saat Rapat Kerja di DPR menyebutkan, saat ini alokasi oksigen untuk sektor industri sebesar 70 persen. Sedangkan sektor kesehatan dialokasikan hanya sebesar 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan untuk medis sebesar 800 ton per hari (atau 292 juta ton per tahun) dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2.000 ton per hari (730 juta ton per tahun).

“Jadi kalau digeser kuota sektor industri ke sektor kesehatan, apalagi kalau kapasitas pabrik oksigen yang mengganggu ini dioptimalkan, maka masih ada sisa sebesar 137 juta ton per tahun. Artinya produksi gas oksigen dalam negeri relatif cukup,” tegasnya.

Jadi, lanjutnya, apa yang dilakukan pemerintah untuk menggeser alokasi gas oksigen industri untuk kesehatan sampai 100 persen di masa-masa panik seperti sekarang ini sudah tepat. Sehingga, tambah Mulyanto, yang perlu segera dilakukan adalah kebijakan untuk mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang mengganggu menuju 100 persen. Ini hal strategis yang perlu dilakukan, agar Indonesia tidak mengandalkan impor lagi.



Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.  
Foto: Andri/Man

Selain itu Mulyanto juga meminta pemerintah memperhatikan aspek pengawasan, terutama pada jaringan distribusi, termasuk juga transportasinya. Pemerintah, melalui aparat pengawasannya, perlu memastikan, bahwa tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Atau ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu, masih kata Mulyanto, pemerintah perlu mensosialisasikan kondisi yang ada kepada masyarakat, agar tidak terjadi *panic buying*. Jangan sampai masyarakat yang tidak membutuhkan, banyak menyimpan gas oksigen ini di rumah. )■ bia/sf

# Ace Syadzily Minta Pemerintah Hati-hati dalam Menetapkan Perpanjangan PPKM

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan sikap pemerintah yang berencana menerapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus berdasarkan atas kajian dan evaluasi mendalam. Tentu evaluasi dan kajian tersebut harus didasarkan atas evaluasi PPKM Darurat yang telah berjalan selama dua minggu ini.

“Jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik, atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, saya kira pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat,” pungkas Ace dalam keterangan pers kepada *Parlementaria*, Senin (19/7).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan dari evaluasi tersebut, dapat diketahui sudah sejauhmana tingkat *positivity rate* dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ini, ada tren pengendalian yang lebih baik.

“Sejauhmana penanganan kesehatan masyarakat, adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat ini terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan RS darurat yang telah dipersiapkan,” sebut Ace lebih lanjut.

Selain itu, Ace mendorong agar program vaksinasi Covid-19 juga terus digenjut secara maksimal hingga kekebalan komunitas (*herd immunity*) bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah

harus memastikan ketersediaan vaksin, dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan merata.

“Melakukan pemerataan program vaksinasi secara masif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula,” imbuh legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

”

**JANGAN BERTARUH DENGAN KESEHATAN MASYARAKAT. COVID-19 MERUPAKAN PENYAKIT MENULAR**

Untuk itu, masih kata Ace, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.

“Saya berkeyakinan pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat, tentu bersama-sama dengan ke disiplin masyarakat,” pungkas Ace menutup pernyataannya. ■ *tn/sf*



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Jaka/Man

# Wacana Pelonggaran Aktifitas Ekonomi Harus Dibarengi Prokes yang Ketat

**W**akil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan, pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan di sisi hulu merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya wacana melonggaran aktivitas ekonomi yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

“Kita melihat bahwa sektor hulu harus menjadi ujung tombak untuk menahan mobilitas dan menjalankan prokes secara benar sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang sudah diberikan oleh kebijakan PPKM Darurat yang Presiden sampaikan,” ucap Melki dalam keterangannya, baru baru ini.

Melki menilai pernyataan Presiden Jokowi soal perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah sesuai dengan saran dan masukan yang

disampaikan berbagai pihak. Rencana melonggaran aktivitas ekonomi dengan pembatasan khusus serta membuka ruang bagi masyarakat kecil untuk tetap bekerja.

“Tapi tentu dengan prokes yang lagi-lagi harus dilaksanakan dengan sedemikian ketat untuk menghindari penularan yang tinggi ketika beraktivitas di luar rumah,” ujar politisi Partai Golkar itu. Selain itu, dalam penerapannya mesti diawasi dengan ketat oleh aparat penegak hukum agar kelonggaran tidak menimbulkan persoalan baru.

Di samping itu, Melki juga menekankan pentingnya penanganan pasien Covid-19 di sisi hilir dengan memperkuat kapasitas rumah sakit, tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan. “Harus benar-benar dipastikan siap untuk menjaga sektor hilir untuk tetap menjaga pelayanan kesehatan kita yang ideal, optimal, baik bagi pasien Covid-19 maupun pasien penyakit-penyakit lainnya,” terang Melki.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli dengan

catatan. Menurutnya, keputusan itu benar-benar mengutamakan sektor kesehatan. “Dengan mendengar berbagai masukan, ekonomi dalam kapasitas tertentu, seperti meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Sampai tanggal 25 Juli, kita lihat perkembangan Covid apakah akan ada penyesuaian lagi. Kami harap angka penyebaran semakin turun,” tutupnya.

■ rnm/es

”

**TAPI TENTU DENGAN PROKES YANG LAGI-LAGI HARUS DILAKSANAKAN DENGAN SEDEMIKIAN KETAT UNTUK MENGHINDARI PENULARAN YANG TINGGI KETIKA BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.  
Foto: Azka/Man





# Saleh Daulay Apresiasi Pembatalan Vaksin Individu Berbayar

**K**eputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan vaksinasi individu berbayar perlu didukung dan diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, hal itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak terkait lainnya diminta segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.

“Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka Kemenkes harus merubah Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 19 Tahun 2021,” kata Saleh dalam siaran persnya kepada *Parlementaria*, Minggu (18/7).

Dalam Permenkes tersebut sangat jelas bagaimana setiap individu bisa mengakses vaksin Covid-19. Sebelumnya, vaksin Gotong Royong sempat menjadi kontroversi, karena ditujukan untuk individu dengan sistem berbayar. Awalnya vaksin ini dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Bila program tersebut hendak dilanjutkan, sambung Ketua F-PAN DPR ini, maka Permenkes-nya harus direvisi dulu.

“Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak

Anggota Komisi IX DPR RI  
Saleh Partaonan Daulay.  
Foto: Azka/Man



”

**VAKSIN ITU ADALAH HAK SEMUA ORANG. OLEH KARENYA, TIDAK BOLEH MEMBEBANI DAN MEMBERATKAN MASYARAKAT**

lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target,” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu.

Percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama. Sementara,

varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang. “Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksinasi 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong membantu pemerintah,” pandang Saleh.

Vaksinasi berlomba dengan kasus terinfeksi. Kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan para tenaga medis membuat semua was-was. Dengan vaksinasi, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun. Dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Apresiasi, sambung Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini itu, perlu disampaikan kepada para tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Tak lupa juga apresiasi dilayangkan bagi BUMN yang telah mendistribusikan obat-obatan dan vitamin gratis bagi masyarakat. ■ mh/sf

# PTM Terbatas Untuk Cegah Generasi yang Hilang



Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto: Azka/Man

**A**nggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menilai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas merupakan cara untuk mencegah lahirnya generasi yang hilang (*lost generation*). Sebab, kewajiban PTM Terbatas bagi sekolah pada tahun ajaran dan akademik 2021/2022 adalah upaya pemerintah dan DPR dalam melaksanakan tujuan bernegara.

Andreas menambahkan, PTM Terbatas yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2021, penting untuk melindungi segenap anak-anak Indonesia dari bahaya Covid-19, namun di sisi lain tidak menghentikan proses pembelajaran demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita tidak mau karena pandemi ini ada *‘lost generation’* (generasi yang hilang) dari bangsa kita. Baik hilang karena terinfeksi Covid-19, ataupun hilang karena belajarnya terhenti karena pandemi,” ujar Andreas dalam keterangan tertulis yang

”

**KITA TIDAK MAU KARENA PANDEMI INI ADA ‘LOST GENERATION’ (GENERASI YANG HILANG) DARI BANGSA KITA**

diterima *Parlementaria*, Kamis (15/7).

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memaparkan, SKB 4 Menteri sudah mengatur dengan detail terkait perlindungan anak-anak sekolah yang melakukan PTM Terbatas dari bahaya Covid-19. Misalnya, hanya sekolah yang pendidik dan tenaga pendidiknyanya telah divaksin saja yang boleh menyelenggarakan PTM Terbatas.

“Kemudian di situ (SKB 4 Menteri) juga sudah diatur detail tentang untuk pelaksanaan PTM Terbatas diputuskan di unit pemerintahan kabupaten/kota dengan pertimbangan situasi daerah.

Jadi kalau di daerahnya diterapkan PPKM Darurat seperti di Jawa-Bali sekarang ini, otomatis PTM terbatas tidak dilaksanakan. Siswa kembali belajar dari rumah,” ujar Andreas.

Sebaliknya, kata politisi PDI-Perjuangan itu, jika sekolah yang pendidik dan tenaga pendidiknyanya sudah divaksin dan diputuskan oleh pemerintah daerah setempat boleh melaksanakan PTM Terbatas, maka sekolah tersebut wajib melaksanakannya.

“Karena Indonesia ini kan luas. Situasi pandemi ini juga beda-beda di tiap daerah. Kemudian dukungan infrastruktur IT (Information Technology) untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga beda-beda di tiap wilayah, maka tidak boleh disamaratakan aturannya,” kata Andreas.

Kalaupun ada yang disamaratakan, lanjut Andreas, adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dalam PTM Terbatas. “Tidak hanya wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, tapi sampai ruang belajar dan toilet sekolahnya pun sudah diatur sangat detail,” kata Andreas.

Andreas menyebut aturan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, sudah sangat bagus karena tetap bisa diterapkan dalam semua kondisi pandemi. Termasuk kondisi adanya virus Corona varian Delta yang sudah masuk ke 11 provinsi di luar Jawa.

Oleh karenanya, dengan adanya virus varian baru yang lebih menular dan banyak menjangkiti anak-anak ini, DPR dan pemerintah tidak perlu membuat aturan baru lagi terkait PTM. Sebab, semua sudah diatur lengkap dalam SKB 4 Menteri. “Terlalu banyak aturan nanti malah bikin bingung,” ujar Andreas. ■ rdn/sf

# Setop Semua Proyek Selain Penanganan Covid-19

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyerukan agar semua proyek pemerintah selain penanganan Covid-19 disetop saja. Semua harus berkonsentrasi pada penanganan wabah Covid-19 yang belum diketahui sampai kapan berakhir. Penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Hal ini disampaikan Fathan dalam siaran persnya kepada *Parlementaria*, Rabu (21/7). Oleh karena itu, proyek-proyek yang tidak terkait penanganan pandemi sebaiknya ditunda, seperti rencana pembangunan ibu kota baru, penyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.

“Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana. Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan *recovery* ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” tandas Fathan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak pemerintah memperketat pelaksanaan PPKM Darurat. Menurutnya, lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu, daripada terus terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam peluang *recovery* ekonomi dalam jangka panjang. “Kami berharap dengan kebijakan tersebut terjadi penurunan mobilitas sosial yang bisa menekan lonjakan kasus positif maupun kasus aktif yang saat ini menjadi tertinggi di dunia,” harap Fathan.

Selama pandemi berlangsung, sambungnya, ada peningkatan jumlah pengangguran yang berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang, *year on year* (YoY) dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 6,93 juta orang. Selain itu, hingga kuartal I/2021 orang miskin bertambah menjadi 27,54 juta orang atau naik 1,12 juta orang dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.

“Ini menunjukkan perlunya *refocusing* atas penanganan pandemi. Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis. Hanya dibutuhkan tiga hal, setop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat, dan bangun industri pangan masyarakat,” seru legislator dapil Jawa Tengah II itu lebih lanjut.

Dia melanjutkan, penguatan ketahanan pangan akan menghindari negara dari krisis pangan pascapandemi. “Saat kita akan kembali membangun, kita sudah memiliki modal pangan yang cukup untuk masyarakat, sehingga tidak akan ada cerita kelaparan. Jika masyarakat sehat dan pangan tercukupi, pemerintah akan lebih mudah untuk kembali melanjutkan pembangunan,” pandang Fathan.

Ia menjelaskan lonjakan kasus Covid-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi juga mengalami koreksi. Saat ini Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dari kisaran 4,6 persen menjadi 3,8 persen sepanjang tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga merevisi target pertumbuhan ekonomi di angka 3,7-4,5 persen, dari kisaran 4,3-5,3 persen sepanjang 2021. “Kami menilai dengan perkembangan terbaru yang ada maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” desak Fathan. ■ mh/es



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. Foto: Arief/Man

# Perlu Solusi Alternatif Atur Peredaran Minuman Beralkohol



Anggota Badan Legislasi DPR RI Bukhori. Foto: JakaMan

**A**nggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori menyampaikan bahwa permasalahan yang ditimbulkan karena keberadaan minuman beralkohol membutuhkan solusi alternatif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Bukhori dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan para pakar terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol).

“Pengendalian (minuman beralkohol) itu sudah berjalan sejak berpuluh-puluh tahun. Baik secara regulasi maupun secara aksi. Tapi faktanya (regulasinya) kemudian tidak bisa menyelesaikan (permasalahan peredaran minuman beralkohol), sehingga perlu alternatif yang lain,” terang Bukhori dalam rapat tersebut, Rabu (14/7).

Politisi Partai Keadilan Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, peredaran minuman beralkohol di Indonesia hingga hari ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Peralunya, peredaran minuman beralkohol ini selain menjadi pemasukan negara yang potensial, juga menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat. Mulai dari awal penggunaan narkoba, pelanggaran hukum, bahkan kekerasan di masyarakat. Bahkan, keberadaan alkohol dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Bukhori meneruskan, antara *income* yang diterima negara dengan biaya yang harus dikeluarkan negara akibat kecelakaan akibat kerusakan mental, akibat berbagai macam hal tersebut di Indonesia belumlah seimbang. Dia juga memberikan salah satu contoh kasus terkait dampak minuman beralkohol diantaranya Inggris. Berdasarkan informasi yang diketahuinya, sebesar dua persen dari APBN negara tersebut dikururkan dalam rangka untuk menganggulangi akibat dari miras.

“Itu sangat besar saya kira, dan pemasukannya juga tidak tetap. Tetapi budaya mereka di Inggris juga berbeda,” imbuh politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I tersebut. Meski begitu, hal-hal terkait minuman beralkohol yang sifatnya bisa dimengerti secara budaya, ekonomis, dan kegiatan ekonomis itu bisa terkendali dengan baik. Menurutnya hal itu perlu diberikan ruang. Sehingga dia berharap hal tersebut dapat dipikirkan lebih lanjut.

”

**PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA HINGGA HARI INI MASIH MENYISAKAN BANYAK PEKERJAAN RUMAH YANG PERLU DISELESAIKAN.**

Dalam rapat virtual yang dihadiri Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dan Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (GENAM), terdapat sejumlah usulan yang mengemuka. Usulan tersebut di antaranya pengendalian alkohol yang meliputi batas kandungan alkohol, tempat yang diperbolehkan menjual alkohol dan batas usia yang boleh mengonsumsi alkohol. ■ hal/sf

# Ratna Juwita Minta Kemenkeu Kawal Sektor-sektor Terdampak Pandemi

**A**nggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi Covid-19, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan UMKM. Dirinya mendengar sampai saat ini banyak dari masyarakat terdampak tersebut yang mengalami kesulitan mengakses jaring-jaring pengaman pemerintah.

“Nah oleh karena ini kan ada *dispute* di situ, sehingga ada skema-skema lanjutan yang akan mempermudah penyerapan yang sudah dipersiapkan pemerintah dalam hal (menyelamatkan sektor-sektor terdampak) ini,” terang Ratna dalam Rapat Kerja Virtual Banggar DPR RI dengan jajaran Kemenkeu dan Bank Indonesia, Senin (12/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu belum melihat adanya *sense of crisis* yang dilakukan pemerintah. Ratna menjelaskan, di samping pertumbuhan ekonomi di masyarakat masih rendah, adanya PPKM di awal semester kedua ini menurutnya membuat belanja masyarakat akan semakin turun kembali. Sehingga Ratna berharap agar adanya perlakuan-perlakuan khusus yang dapat menjaga perputaran ekonomi, khususnya di sektor riil.

“Untuk masyarakat kita yang sudah secara kesehatan itu merasa panik dengan adanya *panic buying* ataupun *panic selling* oleh alat-alat kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, mereka harus ditambah lagi beban beban selama PPKM, mereka tidak dapat

melaksanakan sektor ekonomi mereka secara normal,” jelas legislator dapil Jawa Timur IX itu.

Rapat Virtual Banggar DPR RI yang mengundang Kemenkeu dan Bank Indonesia tersebut membahas mengenai Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun

Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif, yakni pada penerimaan pajak, cukai dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Selain itu, Kemenkeu juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen apabila PPKM berlangsung lebih panjang. Proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen. ■ hal/es

”

**SAMPAI SAAT INI BANYAK DARI MASYARAKAT TERDAMPAK TERSEBUT YANG MENGALAMI KESULITAN MENGAKSES JARING-JARING PENGAMAN PEMERINTAH.**

Anggota Banggar DPR RI  
Ratna Juwita Sari.  
Foto: Nalfuroji/Man



# Aturan PPKM Harus Kedepankan Humanisme

**P**andemi Covid-19 tidak hanya menyerang kesehatan jasmani masyarakat, lebih dari itu masyarakat dihadapkan dengan masalah finansial. Tak sedikit masyarakat yang kelaparan karena tak ada penghasilan. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, di satu harus ditaati, tapi di sini lain penegakan aturan ini harus bijaksana dengan mengedepankan maslahat dan yang paling penting aparat harus bersikap

”

**PENDEKATAN HUMANIS INI PENTING DALAM MEMBERIKAN PENGERTIAN TENTANG ATURAN PPKM DAN PADA SAAT YANG BERSAMAAN JUGA MENUNJUKKAN KEPEDULIAN PETUGAS TERHADAP WARGA YANG KESUSAHAN KARENA PANDEMI COVID-19.**

humanis pada rakyat.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengimbau, jika memang harus dilakukan penertiban hendaknya utamakan cara-cara yang lebih humanis dan mengedukasi. “Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolonglah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (tengah). Foto: Jaka/Man

lakukan dengan humanis. Jangan arogan,” tegas Sahroni dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, baru-baru ini.

Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan pendekatan humanis ini penting dalam memberikan pengertian tentang aturan PPKM dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan kepedulian petugas terhadap warga yang kesusahan karena adanya pandemi Covid-19.

“Kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal *take away*. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan ‘menghajar’ warungnya,” katanya.

Sahroni menambahkan, bersikap tegas bukan berarti kasar. Selain

melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.

“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti *push up* atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” pungkas Sahroni.

Teranyar, viral di media sosial video yang memperlihatkan Satpol PP memukul seorang ibu yang diduga hamil di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. “Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM Darurat ini,” keluh legislator dapil DKI Jakarta III itu. ■eko/es

# Satgas DPR Apresiasi Pembangunan RSPP Modular Khusus Covid-19



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meninjau pembangunan Rumah Sakit Modular milik RS Pusat Pertamina (RSPP) di Jakarta Barat. Foto: Yoga/Man

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Modular milik Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) karena dibangun dengan sangat cepat dan progres yang baik.

Apresiasi tersebut disampaikan Sufmi saat memimpin Satgas Lawan Covid-19 DPR RI meninjau ke RS tersebut di Jakarta Barat, Jumat (16/7). Diketahui RSPP Modular dapat memenuhi kebutuhan sebanyak 200 kamar ICU dan 118 kamar perawatan non ICU.

“Ya kita apresiasi sekali, bahwa hari

ini kita meninjau kesiapan Rumah Sakit Modular khusus Covid yang dibangun oleh Pertamina dengan pengerjaan Wijaya Karya, dalam waktu yang singkat di lahan total 4 hektar baru digunakan 1,5 hektar untuk kebutuhan 200 ICU dan 118 kamar perawatan yang tidak masuk ICU,” kata Dasco saat kunjungan ke RSPP, Jakarta, Jumat (16/7).

Hadir mendampingi kunjungan tersebut, yaitu Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) Dedi Sunardi dan Direktur Utama PT Pertamedika Fathema Djan Rahmat.

Setelah melihat desain dari RSPP Modular, Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI itu menjelaskan bahwa

ada hal menarik dari RS tersebut, yaitu terdapat banyak kaca untuk melihat (sudut pandang/view) keluar gedung rumah sakit. Sehingga diharapkan dapat mengurangi stres para pasien.

Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa RSPP Modular ini akan efektif digunakan dalam waktu dua minggu ke depan secara bertahap dapat menerima pasien Covid-19.

“Kalau menurut kawan-kawan dari Pertamina dan Wijaya Karya, efektif dua minggu ke depan secara bertahap akan mulai dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini,” harap legislator daerah pemilihan Banten II tersebut. ■ rdn/sf



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



**RACHMAT GOBEL**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORINBANG



**M. AZIS SYAMSUDDIN**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORPOLKAM



**PUAN MAHARANI**  
KETUA DPR RI



**SUFMI DASCO AHMAD**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KOREKUU



**A. MUHAIMIN ISKANDAR**  
WAKIL KETUA DPR RI  
BIDANG KORKESRA

mengucapkan

# SELAMAT HARI ANAK NASIONAL

23 Juli 2021

"Anak Terlindungi, Indonesia Maju"

